

GEJALA KAPITALISME DALAM USAHA PONDOKAN DI YOGYAKARTA

*Agus Sudaryanto**

INTISARI

Arus globalisasi tidak dapat dihindari oleh masyarakat manapun di dunia ini. Salah satu dampaknya masyarakat Yogyakarta yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani juga mendapat tantangan dalam mengantisipasi dan mensikapi dominasi kapitalisme. Sebelum faham ini mendominasi, sudah ada konsep bahwa dalam kehidupan masyarakat hubungan antar warga yang satu dengan lainnya selalu menjunjung tinggi nilai tolong menolong dan tenggang rasa. Perkembangannya, masyarakat Yogyakarta yang mempunyai usaha pondokan dalam kenyataannya mengalami ambivalensi. Oleh karena asas tolong menolong dan tenggang rasa mulai terdistorsi dengan asas kapitalisme.

A. Pendahuluan

Masyarakat dunia saat ini tidak dapat mengelak untuk memasuki peradaban baru atau globalisasi di abad 21. Perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan maupun secara revolusioner di berbagai kehidupan baik politik, sosial, budaya dan ekonomi sudah mulai dapat dirasakan. Arus globalisasi yang melanda dunia dapat membawa berbagai dampak, seperti adanya orang yang merasa khawatir, cemas dan bahkan takut karena seringkali perubahan yang terjadi di masyarakat tidak sesuai bahkan bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku. Dampak globalisasi oleh Riggs disebutkan bahwa di negara-negara di dunia ketiga atau negara berkembang keadaannya mengalami polynormative, banyak norma dan anomi.¹ Hal ini dikarenakan mainstream tersebut ditopang adanya dominasi kapitalisme yang dijalankan di berbagai negara maju maupun negara sedang berkembang.

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, sebagian besar masyarakatnya masih menggantungkan

kehidupannya dalam bidang pertanian. Jumlah mereka masih cukup besar yang tinggal di pedesaan. Dengan demikian mata pencaharian sebagai petani masih mendominasi. Menurut Koentjaraningrat, mentalitas petani Indonesia pada dasarnya menilai tinggi konsep sama rata-sama rasa. Dalam konsep itu terkandung makna bahwa di kehidupan dunia manusia bisa saling membantu antar sesama dalam masa kesusahan atau senang. Hal ini sering disebut dengan asas tolong menolong dan atau gotong royong. Di samping itu, kehidupan masyarakat desa mempunyai kewajiban untuk terus-menerus berusaha memelihara hubungan yang baik, memperhatikan keperluan-keperluannya dan sedapat mungkin selalu membagi rata keuntungan-keuntungan dengan sesama.² Adapun perwujudan dari nilai kerja sama dalam masyarakat semacam ini sebagaimana dinyatakan Martindale dan dikutip oleh Soehardi didasarkan empat sifat manusia, yaitu simpati, keramahan, rasa keadilan dan kepentingan pribadi yang selaras dengan tatanan sosial menurut adat-istiadat.³

* S.H, M.Si, Staf Pengajar pada Fakultas Hukum UGM.

¹ M.Munandar Soelaiman, 1988, *Dinamika Masyarakat Transisi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 88.

² Koentjaraningrat, 1985, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 41.

³ Soehardi, 2002, *"Nilai-nilai Tradisi lisan dalam Budaya Jawa"*, Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM, Vol. XIV, No. 3, hlm. 273.

Asas gotong-royong yang menjadi landasan kehidupan politik, ekonomi dan sosial bangsa secara ideal dapat digunakan untuk kepentingan nasional negara Republik Indonesia. Namun dalam praktek kehidupan, seringkali nilai kebersamaan ini mengalami penyimpangan, dari asas untuk kepentingan bersama menjadi asas untuk kepentingan pribadi atau kelompok.⁴

Di dalam masyarakat pedesaan sudah menjadi tradisi atau adat-kebiasaan bahwa terjadinya perhutangan perseorangan seperti beri memberi, pinjam meminjam, tanggung menanggung, tukar menukar, beli membeli dan sewa menyewa antara pihak satu dengan pihak lainnya melalui kesepakatan atau musyawarah tanpa bukti tertulis. Menurut Hilman, Hukum Adat yang menunjukkan tentang perhitungan dan perjanjian atau transaksi yang bersangkutan dengan hak-hak kebendaan, tanah dan jasa dimasukkan ke dalam Hukum Perjanjian Adat.⁵ Kesepakatan tanpa bukti tertulis ini dikarenakan unsur kepercayaan masih melekat dalam kehidupan suatu masyarakat.

Salah satu jenis Hukum Perjanjian Adat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang cenderung tumbuh cukup pesat adalah perjanjian sewa menyewa pondokan (pondokan) atau titip sewa tempat. Masalah ini terjadi karena seiring dengan perkembangan jumlah kaum terpelajar, baik pelajar atau mahasiswa semakin hari semakin membengkak jumlahnya. Citra Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar nampaknya masih merupakan daya tarik bagi masyarakat dari seluruh penjuru tanah air untuk menimba ilmu di kota ini.

Dengan kedatangan para kaum terpelajar ke Yogyakarta ini tidak bisa tidak mereka memerlukan tempat untuk tinggal (pondokan). Permintaan (*demand*) tersedianya tempat

pondokan ini mengakibatkan tumbuhnya tempat-tempat pondokan menjadi tersebar baik di kawasan kota maupun daerah pedesaan. Masyarakat Yogyakarta yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani akhirnya tidak sedikit yang tertarik untuk memenuhi permintaan tempat tinggal bagi kaum terpelajar itu. Para petani tidak sedikit yang mengalihkan usahanya dari bertani menjadi pengusaha pondokan atau paling tidak usaha pondokan ini dijadikan usaha sampingan selain pekerjaan pokoknya.

Padahal menurut Ever sebagaimana dikutip oleh Damsar dikatakan bahwa sebenarnya moral ekonomi petani yang bercirikan solidaritas tinggi, menekankan tolong menolong, dan subsistensi produk, sangat berbeda dengan moral ekonomi kapitalis yang mengutamakan akumulasi modal baik yang berwujud barang maupun uang.⁶ Dengan demikian tidak mustahil dapat terjadi, sekilas terlihat adanya simbiose mutualistik antara pemilik dan penyewa pondokan tetapi dibalik tolong menolong tersebut terkandung deviasi nilai kebersamaan atau kekeluargaan yang merupakan ciri khas filsafat hidup yang organis.⁷ Dalam masalah ini pihak yang satu hanya mengambil keuntungan materinya saja tanpa mepedulikan nilai-nilai kekeluargaan dan kepatutan. Dengan kata lain, perjanjian sewa menyewa pondokan dalam era globalisasi ini sangat rentan sekali terimbas nilai-nilai kapitalisme sehingga sangat dimungkinkan terjadi hubungan manusia yang akrab antar sesama menjadi semakin luntur. Solidaritas sosial yang *guyub* (*gemeinschaft*), alamiah, lekat, tenggang rasa, kebersamaan serta toleran berubah dan bergeser menjadi hubungan sosial yang bersifat *patembayan* (*gessellschaft*) dan individualistik karena

⁴ Sjafrin Sairin, 2002, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 247.

⁵ Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 144.

⁶ Damsar, 1997, *Sosiologi Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90.

⁷ Rahardjo, 1999, *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 61 dan 65.

hanya didasarkan kepentingan bisnis belaka. Bagi pemilik pondokan dimungkinkan motivasinya tidak lagi tolong menolong, tetapi lebih dominan ke pemaksimalan keuntungan atau *profit maximization*. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di muka, permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah dalam usaha pondokan yang dijalankan para pemilik pondokan di kota Yogyakarta sudah dipengaruhi nilai-nilai kapitalisme ?

B. Perkembangan Yogyakarta Dalam Usaha Pondokan

Pada tahun 1756 Masehi, kota Yogyakarta didirikan oleh Pangeran Mangkubumi, hal ini ditandai dengan sengkalan Dwi Naga Rasa Tunggal. Perkembangan kota ini cukup pesat terutama di wilayah Kabupaten Sleman yang memiliki luas 574, 82 km² dan terdiri 17 kecamatan serta Kota Yogyakarta dengan luas 32,50 km² yang terdiri dari 14 kecamatan.⁸ Kota Yogyakarta saat ini mempunyai kurang lebih 60-an perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan berbagai bentuk seperti universitas, institut, sekolah tinggi dan akademi.

Hasil penelitian Utomo sebagaimana dikutip oleh Sanityastuti menunjukkan perkembangan jumlah mahasiswa di Yogyakarta yang terus meningkat. Pada tahun 1950 jumlah mahasiswa UGM baru sebanyak 981 orang, sepuluh tahun kemudian, 1960 jumlahnya menjadi 13.844 orang. Peningkatan yang cukup pesat terjadi sejak pertengahan tahun 1970-an karena munculnya PTS selain UGM. Pada tahun 1973 jumlah mahasiswa PTS sebanyak 9.722 orang dan UGM sejumlah 14.551 orang. Tahun 1980 jumlah mahasiswa

PTS 27.795 orang (meningkat 3 x lipat atau 75 %) sedangkan UGM naik menjadi 18.511 orang (naik 25 %). Pada tahun 1986 mahasiswa PTS bertambah menjadi 58.829 orang sedangkan UGM menjadi 28.224 orang.⁹

Di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terdapat kurang lebih 1.194 tempat pondokan yang sudah mempunyai surat izin resmi dari pemerintah daerah. Jumlah usaha pondokan di wilayah itu diperkirakan sebenarnya jauh lebih banyak lagi, karena pondokan yang belum mempunyai izin diasumsikan lebih banyak daripada yang mempunyai izin.¹⁰

Dengan melihat perkembangan kebutuhan tempat pondokan bagi kaum terpelajar yang dari tahun ke tahun selalu meningkat dapat diperkirakan tanah yang semula merupakan lahan pertanian nantinya akan segera dirubah menjadi tempat pondokan. Dalam masalah ini hukum ekonomi *supply and demand* akan bekerja. Artinya, selama masih ada permintaan pondokan dalam suatu masyarakat, maka penawaran tempat pondokan akan selalu ada di masyarakat itu. Hal ini diperkuat hasil penelitian Muryanti dkk di wilayah Karangmalang yang berkesimpulan bahwa pengusaha pondokan di daerah tersebut sebagian besar dahulunya adalah bermata pencaharian sebagai petani. Saat ini bisnis pondokan ini bukan lagi sebagai pekerjaan sambilan tetapi sudah menjadi ajang bisnis pokoknya.¹¹ Implikasinya, nilai-nilai yang sudah melekat pada kaum petani seperti tolong menolong atau kekeluargaan mendapat tantangan yang cukup dahsyat dengan nilai-nilai kapitalis yang lebih menekankan aspek material semata. Oleh karena moral ekonomi petani pada dasarnya sangat berlainan dengan

⁸ Yuli Prasetya Nugroho, 1997, "Pondokan Dalam Komunitas Jawa", *Skripsi*, Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta, hlm. 44.

⁹ Marfuah S Sanityastuti, 2002, "*Integrasi dan Potensi Konflik Mahasiswa Pondokan Dengan Masyarakat Setempat*", Tesis, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, hlm. 54-56.

¹⁰ Yuli Pasetya Nugroho, 1997, *op.cit*, hlm. 49.

¹¹ Muryanti, dkk, 2002, "*Pelonggaran Nilai: Persepsi Seksualitas Menurut Mahasiswa Pondokan di Karangmalang*", Laporan Penelitian, Fisip UGM, Yogyakarta, hlm. 5.

moral ekonomi kapitalis. Di samping itu, tidak dapat dipungkiri di wilayah lainpun tidak berbeda jauh dengan di Karangmalang, bahwa bisnis pondokan ini juga merupakan salah satu alternatif mata pencaharian, selain sebagai petani, pegawai, pedagang atau buruh.

C. Usaha Pondokan Menurut hukum Adat

Di dalam sistem Hukum Adat tidak mengenal perbedaan antara benda tetap dan benda tidak tetap atau bergerak sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada umumnya di dalam Hukum Adat suatu benda atau barang dibedakan antara benda yang berupa tanah dan benda selain tanah. Masalah ini membawa konsekuensi penggolongan materi pada Hukum Adat Perekonomian. Hukum ini mengatur tentang bagaimana hubungan-hubungan hukum yang berlaku dalam masyarakat terutama pedesaan terhadap usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam perekonomian. Adapun pengelompokan Hukum Adat Perekonomian digolongkan menjadi hal-hal yang menyangkut hak-hak kebendaan, kerja sama dan tolong menolong, transaksi tanah, transaksi yang bersangkutan dengan tanah dan usaha atau perhutangan perorangan.¹²

Dalam hukum usaha perseorangan terutama memfokuskan pada usaha-usaha atau kerja sama yang berlaku antara orang yang satu dan orang lain secara perorangan. Hal ini dikarenakan pihak satu menyerahkan sesuatu kepada orang lain atau mengerjakan sesuatu bagi orang lain sehingga pihak yang lain mempunyai kewajiban memberi prestasi balasan.¹³ Menurut Sudiyat, ciri pokok Hukum Perutangan Adat adalah sebagai berikut :

- a. Hukum ini baru mengarah ke sifat individualistik;

- b. Aturan-aturan dalam hukum ini hanyalah garis pokoknya saja;
- c. Penggolongan materi hukum ini yang dipentingkan motifnya;
- d. Tidak terdapat ajaran-ajaran umum;
- e. Bersifat riil.¹⁴

Dengan melihat pembagian Hukum Perekonomian Adat dan pendapat di muka, maka usaha pondokan menurut Hukum Adat termasuk dalam usaha perseorangan khususnya sewa menyewa. Hal ini dikarenakan hubungan hukum yang terjadi satu pihak (pemilik pondokan) memberikan suatu kenikmatan atas sesuatu benda (tempat pondokan) dan pihak lainnya (penyewa pondokan) membayar harga suatu kenikmatan tersebut. Apabila tidak ada kewajiban bagi pihak yang menikmati untuk membayar kenikmatan terhadap sesuatu benda yang diserahkan kepadanya, menurut Hukum Adat perbuatan tersebut disebut perbuatan tumpang menumpang.¹⁵

D. Gejala Kapitalisme

Selama berabad-abad dunia sudah dikuasai oleh model ekonomi kapitalis yang menerapkan sistem *free economy*, lebih-lebih dengan kekalahan Uni Soviet dalam perang dingin dengan sekutu-sekutu Amerika. Ciri-ciri model ekonomi kapitalis yang utama di antaranya adalah :

- a. Asas milik pribadi yang tidak diganggu gugat dan kedaulatan konsumen;
- b. Prinsip kebebasan berusaha (*free enterprise*) dan kompetisi yang sempurna (*perfect competition*);
- c. Prinsip memaksimalkan keuntungan (*profit maximization*);
- d. Prinsip produksi untuk pasar bukan dikonsumsi sendiri (subsistensi).¹⁶

¹² Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 217.

¹³ *Ibid*, hlm. 58.

¹⁴ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty*, Yogyakarta, hlm. 51.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.86.

¹⁶ Moeljarto Tjokrowinoto, tt, *Teori Pembangunan, Program Pasca-Sarjana (S-2) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM*, Yogyakarta, hlm.3-4.

Berkaitan dengan perkembangan kapitalisme ini tidak dapat dielakkan adanya tantangan globalisasi yang diciptakan dan dipromosikan oleh Amerika. Globalisasi merupakan istilah yang merebak beberapa dekade terakhir ini sebagaimana istilah modernisme, post-modernisme atau post-imperialisme. Menurut sebagian orang globalisasi diartikan eliminasi batas-batas teritorial antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara tanah air satu dengan tanah air yang lain dan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lain.¹⁷

Desa-desanya pada zaman dahulu bersifat mandiri (selfstanding), karena desa pada waktu itu dapat survive melalui usaha sendiri dengan ditopang kehidupan sosial budayanya sendiri. Namun dengan adanya era globalisasi yang dibarengi kapitalisasi, desa seperti itu sekarang ini sulit ditemukan, kecuali di desa-desa adat seperti Tenganan Pangringsingan di Bali dan Tengger di Jawa Timur yang mungkin dapat dipakai sebagai contoh. Akibatnya perubahan konsep pembangunan dari desa agraris menuju desa industri tidak dapat dihindari. Dampaknya perkembangan sumber daya yang tidak berlangsung secara total mengakibatkan perkembangan masyarakat itu hanya pada lapisan tengah dan atas.¹⁸ Hal ini mengindikasikan semua manusia dapat dianggap sederajat akan tetapi kenyataan kehidupan dalam kelompok-kelompok sosial tidaklah demikian. Menurut Sorokin sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani dikatakan bahwa dalam suatu masyarakat tertentu biasanya terjadi adanya stratifikasi sosial yang paling tidak ada pada kelas ekonomi, politik dan sistem nilai.¹⁹

Kemajuan jaman seperti itu tidak dapat dibendung sehingga percampuran dan perbauran kebudayaan desa –kota (dunia luar) akan semakin terasa dan menimbulkan multi pengaruh. Desa-desa di Jawa dan di luar Jawa akan mengalami perubahan drastis, karena kemajuan komunikasi dan keterpaksaan terjadinya megalopolis. Perubahan itu di antaranya di bidang tata nilai, norma masyarakat dan hubungan kekeluargaan.²⁰

Berkaitan dengan usaha pondokan nampaknya pengaruh ini juga terlihat dalam hubungan antara pemilik dan penyewa pondokan. Pemilik pondokan yang termasuk lapisan menengah ke atas di lingkungannya karena mempunyai akses lebih baik dalam hal modal, informasi, pengetahuan dan pengalaman sangat rentan dimasuki nilai-nilai kapitalis. Lebih-lebih ditunjang adanya kecenderungan perubahan masyarakat dari *gemeinschaft* ke *gesellschaft* atau dari solidaritas mekanik ke organik.

Max Weber sebagaimana dikutip oleh Berger menyatakan bahwa usaha kapitalis itu suatu kegiatan ekonomi yang ditujukan pada pasar dan dipacu untuk menghasilkan laba dengan adanya pertukaran di pasar.²¹ Pemilik pondokan sangat rentan dimasuki nilai kapitalisme ini karena mereka mempunyai posisi dominan dalam menentukan terjadinya kesepakatan dalam sewa menyewa pondokan itu. Oleh karena pihak penyewa pondokan tersubordinasi sehingga mereka tidak mempunyai posisi tawar yang kuat. Hal ini dikarenakan kaum terpelajar terdesak oleh kebutuhan akan tempat tinggal sehingga mereka tidak banyak mempunyai alternatif untuk memilih tempat pondokan yang murah tetapi nyaman.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, 2001, *Umat Islam Menyongsong Abad ke-21*, Intermedia, Solo, hlm. 301.

¹⁸ Suhartono, 2001, "Otonomi Daerah : Meningkatkan Kehidupan Sosial Budaya Produktif" Makalah Seminar Sehari Pemberdayaan Budaya Lokal Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, Yogyakarta, hlm. 3-4.

¹⁹ Abdulsyani, 1994, *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 84-85.

²⁰ Sapari Imam Asy'ari, 1993, *Sosiologi Kota Dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 127.

²¹ Peter L. Berger, 1986, *Revolusi Kapitalisme*, LP3ES, Jakarta, hlm. 21.

Dalam hubungan antara pemilik dan penyewa pondokan ada indikasi bahwa nilai-nilai kepatutan atau kelayakan dan tenggang rasa (*tepa selira*) yang seharusnya menjadi ciri khas kota Yogyakarta mulai terpinggirkan. Hubungan kedua belah pihak mengarah kepada tindakan rasionalitas instrumental (*means-ends schema*) belaka. Satu pihak pemilik pondokan sering kali kurang memperhatikan kelayakan sarana dan prasarana pondokan. Di sisi lain, penyewa pondokan rasa memiliki (*handarbeni*) barang yang ada cenderung hilang. Pemilik pondokan sering kali dirugikan karena barang-barangnya sering rusak, hilang atau bahkan sengaja dibawa pergi sewaktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa pondokan.

Nilai kapitalisme telah memasuki kehidupan masyarakat Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat pada hubungan antara pemilik dan penyewa pondokan yang semakin renggang. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Suminar dkk di kawasan Kecamatan Umbulharjo, ternyata sudah ada indikasi pergeseran nilai, cara pandang dan sikap masyarakat terhadap para pendatang (penyewa pondokan) dari sikap *social oriented* menjadi *material oriented*. Hal ini terlihat dari kurang adanya komunikasi dan tidak adanya bimbingan masalah kemasyarakatan terhadap anak pondokan, dimana sebetulnya pemilik pondokan mempunyai kewajiban moral untuk membimbingnya.²² Masalah ini mengindikasikan bahwa anak-anak pondokan yang jauh dari orang tua, keluarga secara biologis sudah mampu mengurangi ketergantungan dengan keluarganya tetapi secara sosial tetap memerlukan bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman seperti pemilik pondokan. Ibu atau bapak pengusaha pondokan sebagai orang tua kedua mempunyai

andil yang cukup besar untuk mengarahkan dan mengawasi kehidupan sosialnya sehingga tidak menyimpang dari norma yang sudah ada.

Selain itu, sistem pondokan juga mempengaruhi pergeseran nilai-nilai moral petani. Pada awalnya sistem pondokan adalah dengan sistem *ngenger* (ikut) kemudian berubah menjadi model pondokan dengan sistem perantara uang. Nilai-nilai transaksi yang muncul semula adalah *non profit*, yaitu pemondok membayar dengan barang seperti beras, buah-buahan, sayur mayur, atau gula (barter) berkembang ke arah nilai-nilai transaksi yang berujud uang sehingga rasionalitas lebih ditonjolkan. Akibatnya masalah pondokan saat ini berkembang menjadi lahan bisnis sesungguhnya.²³ Dengan demikian hubungan antara pemilik dan penyewa pondokan cenderung pada hubungan rasionalitas instrumental (*cost benefit calculation*), yang merupakan ciri khas kapitalisme.

Pergeseran nilai hubungan antara pemilik dengan penyewa pondokan dari kekeluargaan menuju ke orientasi bisnis juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Rulanto di daerah Sendowo, antara lain dapat dilihat dari dibuatnya pintu utama yang berbeda antara tuan rumah dengan pemondok sehingga kebebasan pribadi dapat terjaga, atau adanya pondokan campuran antara perempuan dan laki-laki. Selain itu adanya sistem kontrak, yaitu calon penyewa harus membayar terlebih dahulu uang sewanya, baru dapat menempati ruang yang disewanya. Pada umumnya, penyewa tidak dimungkinkan diizinkan menempati ruang pondokan sebelum membayar terlebih dahulu. Prinsipnya ada uang ada barang, tanpa uang tidak ada ruang.²⁴

Kebebasan yang diberikan oleh pemilik pondokan kepada pemondok terlihat jelas pada

²² Dyah Suminar, dkk, 2002, "Kebutuhan Komunikasi Efektif Anak Pondokan Dengan Pemilik Pondokan Warga Masyarakat dan Keluarga di Kecamatan Umbulharjo", *Laporan Penelitian*, Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta, hlm. 1-2.

²³ *Harian Bernas*, 3 Desember 1994, hlm. 81.

²⁴ M. Ernawan Rulanto, 1981, "Pandangan Orang Jawa Pemilik Pondokan Terhadap Penyewa Non Suku Jawa", Skripsi, Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta, hlm. 12-15.

design bangunan yang terpisah antara pemilik dan pemondok serta pemberian kunci pada masing-masing pemondok. Pemaksimalan ruang dengan cara menerima pemondok laki-laki dan perempuan juga menunjukkan bahwa pemilik tidak selektif dalam memilih calon pemondoknya. Prinsip mereka adalah semua kamar terisi dan ini artinya pendapatan yang maksimal. Dengan kata lain prinsip ekonomi, yaitu dengan modal yang sekecil-kecilnya diperoleh untung sebesar-besarnya berlaku di sini.

Dalam kaitan ini, penelitian Sanityastuti hasilnya juga menunjukkan bahwa usaha pondokan ini sudah mengalami distorsi dari nilai kekeluargaan menjadi nilai kapitalisme. Berdasarkan data empirik yang ditemukan di wilayah Jalan Kaliurang Km 14.5, di sekitar kampus UII, terdapat lebih dari 58,9 % tempat pondokan ditengarai lebih berorientasi nilai bisnis daripada nilai kekeluargaan. Masalah ini dapat dilihat dari beberapa indikasi seperti tidak ditunggunya para pemondok oleh induk semang, karena banyak pemilik pondokan tidak bertempat tinggal di wilayah pondokannya, kurang adanya kontrol dan pengawasan dari pemilik pondokan terhadap tingkah laku pemondok, kurangnya pembauran antar para pihak sehingga seringkali pembicaraan hanya basa basi saja. Di samping itu, ada juga kecenderungan pembentukan kelompok-kelompok kecil yang eksklusif berdasarkan asal daerahnya, etnis, jurusan, angkatan, maupun universitasnya.²⁵ Tidak adanya interaksi dan komunikasi antara pemilik dan pemondok, maupun pemondok dengan masyarakat sekitarnya, hal ini menegaskan prinsip kapitalisme yaitu terjadinya masyarakat berkelas (strata) yang didasarkan pada perbedaan ekonomi semata. Eklusifnya pemondok dibandingkan penduduk setempat

mengarah pada pengkotakan masyarakat yang berakibat tidak adanya pembauran atau bahkan mengarah ke perbedaan sosial yang mencolok. Perbedaan ini jika tidak diantisipasi merupakan potensi yang bisa menimbulkan konflik di belakang hari.

Apabila kondisi masyarakat terutama pemilik usaha pondokan sudah demikian, maka prinsip Darwin mengenai perjuangan untuk hidup dan siapa yang paling mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dialah yang hidup (*survival of the fittes*) dan asumsi Spencer bahwa masyarakat merupakan hasil persetujuan kontraktual antara individu-individu yang bersepakat untuk mengejar kepentingan individunya semakin menunjukkan realitanya.²⁶ Masalah ini tentu merupakan deviasi dari prinsip tolong menolong maupun tenggang rasa. Padahal di negara-negara maju sudah disadari bahwa kapitalisme membawa dampak negatif juga dan sudah berusaha ditanggulangi dengan memberikan jaminan sosial bagi yang tidak mampu bersaing di pasar (dekomodifikasi).

Berkaitan dengan masalah ini De Vos menyatakan bahwa kapitalis yang serakah, kejam dan tidak mempunyai kepedulian, yang beranggapan bahwa mereka boleh saja mendapatkan keuntungan dengan cara apapun meski proses pengerukan tersebut mengakibatkan penderitaan manusia lainnya, harus segera diakhiri. Salah satu caranya adalah diperlukannya pengembangan kapitalisme dengan kepedulian sosial (*compassionate capitalism*) dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷ Di Indonesia nampaknya jaminan sosial terhadap masyarakat yang tidak mampu bersaing dalam era globalisasi ini masih jauh dari kenyataan. Walaupun hal itu merupakan amanat pasal 34 ayat 2 UUD 1945. Tendensinya perekonomian bukan disusun sebagai usaha

²⁵ Marfuah S Sanityas, *op.cit*, hlm. 61.

²⁶ Doyle Paul Johnson, 1994, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, Jilid 1*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 173.

²⁷ Rich De Vos, 1995, *Kapitalisme Dengan Kepedulian Sosial*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xxvi-xxvii.

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan tetapi dibangun berdasarkan asas keuntungan individualita. Kemakmuran sebesar-besarnya bukan untuk rakyat jelata tetapi hanya untuk orang berharta.

E. Penutup

Globalisasi ekonomi membawa pengaruh yang positif maupun negatif bagi masyarakat Yogyakarta. Pelbagai hubungan antar anggota masyarakat yang dahulunya masih berorientasi kekeluargaan dan gotong royong mengalami pergeseran menjadi hubungan yang berorientasi material. Nampaknya ini terjadi sebagai konsekuensi hegemoni kapitalisme dalam kehidupan bangsa Indonesia yang semakin kuat.

Dalam kasus hubungan antara pemilik dengan penyewa pondokanpun terlihat bahwa hubungan yang bersifat kekeluargaan, kelayakan dan tenggang rasa yang menjadi dasar utama, telah berubah menjadi hubungan bisnis *oriented* atau *impersonal* yang mendasarkan pada prinsip ekonomi semata. Hubungan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Yogyakarta menjadi luntur oleh budaya kapitalisme yang selalu melihat semua hubungan dari sisi untung rugi semata atau *cost benefit calculation*..

Apabila hubungan kekeluargaan berubah menjadi hubungan ekonomi semata maka segi-segi masyarakat komunal di mana masing-masing anggota masyarakat di dasarkan kesadaran kolektif, akan tergantikan menjadi hubungan yang bersifat individual atau *impersonal*. Kondisi ini akan sangat memprihatinkan mengingat bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar adalah masyarakat agraris yang awal mulanya sangat menekankan aspek kebersamaan dan kegotong-royongan dalam segala aspek kehidupan.

Oleh karena itu, dalam menghadapi kehidupan yang sudah terhegemoni kapitalisme ini hendaklah dapat mengambil manfaat segi positif yang sebaik-baiknya dengan menekan sisi negatifnya. Sisi positif dari nilai kapitalisme

seperti kemampuan organisasi yang baik, tidak fatalistik, kerja keras, sensitif terhadap signal-signal ekonomi (peluang bisnis) dan disiplin perlu ditumbuh kembangkan. Namun sisi negatifnya seperti memupuk keuntungan semata tanpa peduli keadaan pihak lain, eksploitasi sumber daya alam atau manusia tanpa batas dan terfokus pada orientasi pasar yang berlebihan hendaknya dapat ditekan atau dikontrol. Dengan demikian usaha pondokan yang semakin menjamur ini sebaiknya bukan hanya dipandang sebagai ajang bisnis semata seperti moral ekonomi kapitalis tetapi jika mampu hendaknya nilai-nilai kekeluargaan dan rasa tolong menolong yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakat Yogyakarta dapat dipertahankan. Masyarakat Yogyakarta saat ini sedang menjalani masa transisi, dari mental agraris menuju industrialis. Masa ini mengakibatkan masyarakat mengalami ambiguitas terhadap norma yang dijadikan pedoman. Nilai-nilai lama sudah mulai dipinggirkan sedangkan nilai-nilai yang baru itu belum tentu membawa kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1994, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Berger, Peter L, 1986, *Revolusi Kapitalisme*, LP3ES, Jakarta.
- Damsar, 1997, *Sosiologi Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- De Vos, Rich, 1995, *Kapitalisme Dengan Kepedulian Sosial*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1980, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Imam Asy'ari, Sapari, 1993, *Sosiologi Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Muryanti, dkk, 2002, "Pelonggaran Nilai: Persepsi Seksualitas Menurut Mahasiswa Kos di Karangmalang", *Laporan Penelitian*, Fisip UGM, Yogyakarta.
- Nugroho, Yuli Prasetya 1997, "Pondokan Dalam Komunitas Jawa", *Skripsi*, Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1985, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta.
- Paul Johnson, Doyle, 1994, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern jilid 1*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1963, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Vorklink-Vanhoeve, Bandung.
- Qardhawi, Yusuf, 2001, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*, Era Intermedia, Solo.
- Rahardjo, 1999, *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rulanto, M. Ernawan, 1981, "Pandangan Orang Jawa Pemilik Pondokan Terhadap Penyewa Non Suku Jawa", *Skripsi*, Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta.
- Sairin, Sjafri, 2002, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sanityastuti, Marfuah S, 2002, "Integrasi dan Potensi Konflik Mahasiswa Pondokan Dengan Masyarakat Setempat", *Tesis*, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Soehardi, 2002, "Nilai-nilai Tradisi lisan dalam Budaya Jawa", *Humaniora* Fakultas Ilmu Budaya UGM, Vol. XIV, No. 3.
- Soelaiman, M. Munandar, 1988, *Dinamika Masyarakat Transisi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhartono, 2001, "Otonomi Daerah : Meningkatkan Kehidupan Sosial Budaya Produktif" Makalah Seminar Sehari Pemberdayaan Budaya Lokal Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, Yogyakarta.
- Suminar, Dyah, dkk, 2002, "Kebutuhan Komunikasi Efektif Anak Kos Dengan Pemilik Kos, Warga Masyarakat dan Keluarga di Kecamatan Umbulharjo", *Laporan Penelitian*, Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, tt, *Teori Pembangunan*, Program Pasca sarjana-Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.